

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
DAN
KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BADAN PUSAT STATISTIK
TAHUN 2022**

**AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA II
JAKARTA**

Nomor : 13.b/LHP/XV/05/2023
Tanggal : 17 Mei 2023

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA II
Jalan Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210
Telp (021) 25549000 Pswt. 3502 Surel. staffortama2@bpl.go.id**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN	v
GLOSARIUM.....	vii
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM	x
RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	1
BAB I HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	3
A. PENDAPATAN.....	3
1. Penetapan Denda Tidak Sesuai Dengan Perjanjian Kerja dan Kekurangan Penerimaan atas Pendapatan Denda Lainnya Sebesar Rp136,31 Juta	3
2. Pengendalian atas Pengakuan Pendapatan Denda Pekerjaan Koneksi Internet VSAT BPS Kabupaten/Kota pada Sekretariat Utama BPS Belum Memadai	9
B. BELANJA.....	13
1. Pengelolaan Belanja Pegawai Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan.....	13
2. Pelaksanaan dan Pemanfaatan Kegiatan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Tahun 2022 Belum Memiliki Payung Hukum.....	22
3. Sisa Realisasi Belanja Terlambat Disetorkan ke Kas Negara dengan Nilai Penyetoran Tidak Sesuai Kertas Kerja Perhitungan Belanja, Pertanggungjawaban Belanja Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan, serta Pengawasan BPS atas Kegiatan Belanja Jasa Lainnya Kajian Kualitatif <i>Long Form</i> SP2020 Tidak Optimal	33
4. Pelaksanaan Paket Pekerjaan <i>Outsourcing</i> Tenaga Pengamanan pada Sekretariat Utama BPS Tidak Sesuai Kontrak.....	43
5. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Tidak Didukung dengan Pertanggungjawaban yang Lengkap.....	48
6. Kekurangan Penerimaan dari Pencairan Jaminan Pelaksanaan yang Belum Diserahkan Penyedia Sebesar Rp687,74 Juta dan Denda Keterlambatan atas Pembangunan Gedung Kantor BPS Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Sebesar Rp169,90 Juta	52
7. Kekurangan Volume Pekerjaan Sebesar Rp448,40 Juta dan Pekerjaan yang Tidak Sesuai Spesifikasi sebesar Rp163,40 Juta atas Pekerjaan Konstruksi Renovasi Gedung 3 Sekretariat Utama BPS	63

Handwritten signature/initials

8.	Kekurangan Volume Pekerjaan atas Pekerjaan Revitalisasi Mekanikal dan Elektrikal (ME) Tahap II Gedung 1 Sekretariat Utama BPS Sebesar Rp466,87 Juta	70
9.	Pelaksanaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Fisik Gedung Kantor BPS Provinsi Kalimantan Utara Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp338,63 Juta.....	75
10.	Kekurangan Volume Pekerjaan pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan di BPS Kabupaten Barito Kuala, BPS Kota Prabumulih, BPS Provinsi Kalimantan Utara, dan Sekretariat Utama BPS Sebesar Rp76,36 Juta	78
C.	ASET	86
1.	Penatausahaan dan Pengelolaan Persediaan Belum Sepenuhnya Tertib.....	86
2.	Pencatatan Nilai Barang Milik Negara Gedung dan Bangunan pada Beberapa Satuan Kerja di BPS Belum Sesuai dengan Ketentuan.....	95
3.	Hasil Sensus BMN Tahun 2021 pada Sekretariat Utama BPS belum Sepenuhnya Selesai Ditindaklanjuti.....	101
4.	Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah pada Sekretariat Utama BPS Belum Memadai	104
BAB II	HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN	108

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Rincian Petugas Pemutakhiran Kerangka Geospasial dan Pemutakhiran Wilkerstat ST2023 yang Mengundurkan Diri	4
Tabel 1.2. Rincian Nilai Ganti Rugi dan Alasan Mengundurkan Diri Petugas <i>Long Form</i> SP2020	5
Tabel 1.3. Nilai Kontrak dan Denda Pekerjaan Koneksi Internet VSAT BPS Kabupaten/Kota TA 2022	10
Tabel 1.4. Daftar Pegawai dengan Status Ketidakhadiran Tanpa Kabar Sepuluh Hari Kerja Berturut-turut	13
Tabel 1.5. Pembayaran Gaji Tahun 2022 atas sebanyak Lima Pegawai pada BPS Pusat dan Polstat STIS	14
Tabel 1.6. Kelebihan/Potensi Kelebihan Pembayaran Gaji Tahun 2022 atas Lima Pegawai	14
Tabel 1.7. Daftar Ketidakhadiran Pegawai Tanpa Kabar Tahun 2022	15
Tabel 1.8. Potensi Kelebihan Pembayaran Tunjangan Kinerja Tahun 2022 atas Tujuh pegawai	17
Tabel 1.9. Anggaran dan Realisasi Kegiatan Regsosek Tahun 2022	22
Tabel 1.10. Rincian Realisasi Belanja Kajian Kualitatif <i>Long Form</i> SP2020 Per Tahap	34
Tabel 1.11. Realisasi Belanja Kajian Kualitatif <i>Long Form</i> SP2020	34
Tabel 1.12. Realisasi Belanja Melebihi RAB	35
Tabel 1.13. Pertanggungjawaban Belanja Tidak Sesuai Anggaran	37
Tabel 1.14. Rincian Realisasi Pembayaran Sesuai Adendum Kontrak	43
Tabel 1.15. Rincian Pembayaran Asuransi (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan)	45
Tabel 1.16. Rincian Iuran BPJS Kesehatan yang tidak dibayarkan oleh Penyedia	45
Tabel 1.17. Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri	48
Tabel 1.18. Rincian Adendum Kontrak Pembangunan Gedung Kantor BPS Provinsi Kalimantan Utara	52
Tabel 1.19. Rincian Pembayaran Kontrak Pembangunan Gedung Kantor BPS Provinsi Kalimantan Utara	53
Tabel 1.20. Rekapitulasi Perhitungan Bersama Kekurangan Volume	56
Tabel 1.21. Rincian Adendum Kontrak Renovasi Gedung 3 Sekretariat Utama	63
Tabel 1.22. Rincian Pembayaran Kontrak Renovasi Gedung 3 Sekretariat Utama	63
Tabel 1.23. Rincian Pekerjaan dengan Ornamen <i>Cutting Laser</i>	65
Tabel 1.24. Rincian Adendum Kontrak Pekerjaan Revitalisasi Mekanikal dan Elektrikal (ME) Tahap II Gedung 1	70
Tabel 1.25. Rekapitulasi Pembayaran Pekerjaan Revitalisasi Mekanikal dan Elektrikal (ME) Tahap II Gedung 1 s.d 31 Desember 2022	71
Tabel 1.26. Rincian Selisih Perhitungan Pembayaran Pemasangan Lampu Exit	73

Tabel 1.27. Realisasi Pembayaran Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi Pengawasan Pembangunan Fisik Gedung Kantor BPS Provinsi Kalimantan Utara	76
Tabel 1.28. Rincian Biaya dan Harga Jasa Konsultan Pengawas.....	76
Tabel 1.29. Rincian Pembayaran Kontrak Perluasan Bangunan Gedung Kantor BPS Kabupaten Barito Kuala.....	79
Tabel 1.30. Rincian Pembayaran Kontrak Pembangunan Baru Pagar Permanen BPS Provinsi Kalimantan Utara	80
Tabel 1.31. Rincian Pembayaran Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor BPS Prabumulih.....	81
Tabel 1.32. Rincian Persediaan BPS per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	86
Tabel 1.33. Matriks Permasalahan terkait penatausahaan dan pengendalian persediaan di lingkungan BPS	87
Tabel 1.34. Realisasi Belanja Keperluan Kelistrikan dan Belanja Alat Kebersihan di Settama BPS	92
Tabel 1.35. Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang Tercatat dalam Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Neraca BPS Tahun 2022	96
Tabel 1.36. Timeline TL Hasil Sensus BMN Tahun 2021	101
Tabel 1.37. Hasil Sensus BMN TA 2021 Settama BPS yang Belum Selesai Ditindaklanjuti....	102
Tabel 1.38. Rincian Nilai Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022	104
Tabel 1.39. Hasil Pemeriksaan Fisik Aset Tetap TDO Settama BPS.....	105
Tabel 1.40. Daftar Rincian AT TDOP Settama BPS yang Dilakukan Koreksi pada Neraca BPS Tahun 2022	105
Tabel 1.41. Daftar Rincian Aset Tetap TDOP Settama BPS Belum Ditemukan	105

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Rincian Anggaran dan Realisasi Kegiatan Regsosek
Lampiran 2	Rincian Petugas Lapangan Regsosek yang Mengundurkan Diri
Lampiran 3	Rincian Petugas Lapangan Regsosek yang Belum Dibebankan Ganti Rugi
Lampiran 4	Daftar Hadir Lima Pegawai yang Diduga Melakukan Pelanggaran Disiplin
Lampiran 5	Pembayaran Gaji dan Kelebihan/Potensi Kelebihan Pembayaran Gaji Tahun 2022 atas Lima Pegawai
Lampiran 6	Daftar Hadir Tujuh Pegawai yang Diduga Melakukan Pelanggaran Disiplin
Lampiran 7	Potensi Kelebihan Pembayaran Tukin Tahun 2022 atas Tujuh Pegawai
Lampiran 8	Rincian Anggaran dan Realisasi Kegiatan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi per Wilayah Per 31 Desember 2022
Lampiran 9	Daftar Ketidaklengkapan Dokumen Pertanggungjawaban Tahap Pelaksanaan serta Tahap Diseminasi dan Pelaporan
Lampiran 10	Riwayat Surat Persetujuan Penggantian Personil Oleh PPK terhadap Surat Pemberitahuan Penggantian Personil dari PT PSM
Lampiran 11	Perhitungan Kekurangan Penerimaan Biaya Personil (Gaji dan Tunjangan Hari Raya)
Lampiran 12	Belanja Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Dalam Kota (Kode MAK 524114) belum dilengkapi dokumen pertanggungjawaban
Lampiran 13	Belanja Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Luar Kota (Kode MAK 524119) belum dilengkapi dokumen pertanggungjawaban
Lampiran 14	Belanja Perjalanan Biasa (Kode MAK 524111) belum dilengkapi dokumen pertanggungjawaban
Lampiran 15	Perhitungan <i>Volume</i> Pekerjaan Arsitektur Pembangunan Gedung Kantor BPS Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022
Lampiran 16	Perhitungan <i>Volume</i> Pekerjaan Struktur Pembangunan Gedung Kantor BPS Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022
Lampiran 17	Perhitungan Kekurangan <i>Volume</i> dan Analisis Harga Satuan Pekerjaan Hasil Audit BPK Pekerjaan Konstruksi Renovasi Gedung 3 Badan Pusat Statistik TA 2022
Lampiran 18	Perhitungan Selisih Harga Satuan Timpang
Lampiran 19	Perhitungan <i>Volume</i> Pekerjaan Revitalisasi Mekanikal dan Elektrikal (ME) Tahap II Gedung 1
Lampiran 20	Perhitungan Kurang <i>Volume</i> Pekerjaan Perluasan Pembangunan Gedung Kantor Permanen BPS Kabupaten Barito Kuala TA 2022
Lampiran 21	Perhitungan Kurang <i>Volume</i> Pekerjaan Renovasi Taman Gedung 1 BPS
Lampiran 22	Perhitungan Kurang <i>Volume</i> Pembangunan Pagar BPS Prov Kalimantan Utara

- Lampiran 23 Perhitungan Kekurangan *Volume* Pembangunan Gedung Kantor BPS Kota Prabumulih (TA 2022)
- Lampiran 24 Selisih Pencatatan Barang Persediaan pada BPS Kota Palembang
- Lampiran 25 Daftar Barang yang Belum Diketahui Nilai Perolehannya
- Lampiran 26 Tindak Lanjut Hasil Sensus BMN TA 2021 di Settama BPS
- Lampiran 27 Daftar Rincian Aset Tetap TDOP Settama (*sampling*) TA 2022
- Lampiran 28 Rencana Aksi (*Action Plan*) Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BPS TA 2022

GLOSARIUM

A

<i>Advanced services</i>	: Layanan lanjutan
<i>As Build Drawing</i>	: Gambar hasil terbangun
<i>As Plan Drawing</i>	: Hasil jasa perencanaan
<i>Authorized Reseller</i>	: Pengecer Resmi
<i>Availability</i>	: Ketersediaan

B

<i>Back Up Data</i>	: Data cadangan
<i>Billing</i>	: Tagihan

C

<i>Contact center</i>	: Pusat Kontak
<i>Customer support</i>	: Dukungan pelanggan
<i>Cross check</i>	: Cek silang

D

<i>Downtime</i>	: Kondisi di mana sebuah sistem, layanan atau server tidak berfungsi sama sekali.
-----------------	---

E

<i>E-learning</i>	: Pembelajaran elektronik
<i>Event service</i>	: Layanan acara

G

<i>Global service</i>	: Layanan global
-----------------------	------------------

H

<i>Hardware</i>	: Perangkat keras
<i>Helpdesk</i>	: Meja Bantuan

I

<i>Instalation support</i>	: Dukungan instalasi
----------------------------	----------------------

L

<i>learning center</i>	: Pusat pembelajaran
<i>live training</i>	: Pelatihan langsung
<i>Log Down Time</i>	: Catatan waktu henti

M

<i>Maintenance</i>	: Pemeliharaan
<i>Managed services</i>	: Layanan terkelola
<i>Mobile</i>	: Seluler
<i>Multi Router Traffic Grapher</i>	: Aplikasi yang digunakan untuk memantau beban trafik secara <i>real time</i> pada link jaringan

O	
<i>Overhead cost</i>	: Biaya tidak langsung
<i>On call</i>	: Dalam panggilan
P	
<i>Participants</i>	: Peserta
<i>Plugin</i>	: Pengaya
<i>Premier support</i>	: Dukungan utama
<i>Price quotation</i>	: Penawaran harga
<i>Probit Advisor</i>	: Penasihat kejujuran
<i>Professional services</i>	: Layanan profesional
<i>Profesional support</i>	: Dukungan profesional
<i>Provider</i>	: Perusahaan atau badan usaha yang menyediakan layanan kepada pengguna
R	
<i>Rapid Test</i>	: Tes cepat
<i>Recovery</i>	: Pemulihan
<i>Reseller partner</i>	: Mitra pengecer
S	
<i>Screenshot</i>	: Tangkapan Layar
<i>Service</i>	: Layanan
<i>Service support</i>	: Dukungan layanan
<i>Sharing knowledge</i>	: Berbagi ilmu
<i>Software</i>	: Perangkat lunak
<i>Sparerpart</i>	: Suku cadang
<i>Stock Opname</i>	: Perhitungan persediaan fisik
<i>Subject Matter</i>	: Pihak yang menjadi subyek
<i>Software</i>	: Perangkat lunak
T	
<i>Teleconference</i>	: Telekonferensi
<i>Timeline</i>	: Garis Waktu
U	
<i>Unaudited</i>	: Tidak diaudit
V	
<i>Video Conference</i>	: Konferensi Video
<i>Virtual Private Network</i>	: Sebuah teknologi komunikasi yang memungkinkan untuk dapat terkoneksi ke jaringan public dan menggunakannya untuk dapat bergabung dengan jaringan local
<i>VSAT</i>	: Stasiun penerima sinyal dari satelit dengan antena penerima berbentuk piringan dengan diameter kurang dari tiga meter

	W	
<i>Work from home</i>	:	Bekerja dari rumah
	Z	
<i>Zoom Client</i>	:	Klien <i>Zoom</i>
<i>Zoom Meeting</i>	:	Pertemuan melalui aplikasi <i>zoom</i>

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

A	
AADB	: Alat Angkutan Darat Bermotor
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APK	: Analis Pengelola Keuangan
ASN	: Aparat Sipil Negara
ATM	: Anjungan Tunai Mandiri
B	
BAPP	: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
BAST	: Berita Acara Serah Terima
BMN	: Barang Milik Negara
BKN	: Badan Kepegawaian Negara
BKU	: Buku Kas Umum
BLU	: Badan Layanan Umum
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPKAD	: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
BPN	: Badan Pertanahan Nasional
BPS	: Badan Pusat Statistik
BRI	: Bank Rakyat Indonesia
BUN	: Bendahara Umum Negara
C	
CaLK	: Catatan atas Laporan Keuangan
CCO	: <i>Change Contract Order</i>
CSV	: <i>Comma Separated Values</i>
D	
DBL	: Daftar Barang Lainnya
DBR	: Daftar Barang Ruangan
DC	: <i>Data Center</i>
DIPA	: Daftar Isian Penggunaan Anggaran
DJKN	: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
DTKS	: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
E	
e-rekon	: Elektronik Rekonsiliasi
F	
FGD	: <i>Focus Group Discussion</i>
G	
Gb	: <i>Gigabite</i>
H	
HPS	: Harga Perkiraan Sendiri

K	
KAK	: Kerangka Acuan Kerja
KDP	: Konstruksi Dalam Pengerjaan
KIB	: Kartu Inventaris Barang
KJPP	: Kantor Jasa Penilai Publik
K/L/D/I	: Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi
KPPN	: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KPA	: Kuasa Pengguna Anggaran
Kwh	: <i>Kilowatt-hour</i>
L	
LDK	: Lembar Data Kualifikasi
LHP	: Laporan Hasil Pemeriksaan
LK	: Laporan Keuangan
LKPP	: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
LPJ	: Laporan Pertanggungjawaban
LPSE	: Layanan Pengadaan Secara Elektronik
M	
Kemen PANRB	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
MOU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
MRTG	: <i>Multi Router Traffic Grapher</i>
N	
NPWP	: Nomor Pokok Wajib Pajak
NUP	: Nomor Urut Pendaftaran
O	
OB	: Orang/Bulan
P	
PA	: Pengguna Anggaran
PANRB	: Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
PC	: <i>Personal Computer</i>
Pemda	: Pemerintah Daerah
Perka	: Peraturan Kepala
Permendagri	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
Perpres	: Peraturan Presiden
PHO	: <i>Provisional Hand Over</i>
PIC	: <i>Person in Charge</i>
PJA	: Penanggung Jawab Anggaran
PKS	: Perjanjian Kerja Sama
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNS	: Pegawai Negeri Sipil

POK	:	Petunjuk Operasional Kegiatan
Pokja	:	Kelompok Kerja
Polri	:	Polisi Republik Indonesia
PP	:	Peraturan Pemerintah
PPABP	:	Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai
PPK	:	Pejabat Pembuat Komitmen
PPN	:	Pajak Pertambahan Nilai
PPSPM	:	Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar
Pusdiklat	:	Pusat Pendidikan dan Pelatihan

R

RAB	:	Rencana Anggaran Biaya
RAM	:	<i>Random Access Memory</i>
RENSTRA	:	Rencana Strategis
RPerpres	:	Rancangan Peraturan Presiden
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

S

SAKIP	:	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Satker	:	Satuan Kerja
SBM	:	Standar Biaya Masukan
SBSK	:	Standar Barang Standar Kebutuhan
SDM	:	Sumber Daya Manusia
Selindo	:	Seluruh Indonesia
Settama	:	Sekretariat Utama
SIKaP	:	Sistem Informasi Kinerja Penyedia
SIMAK	:	Sistem Informasi Manajemen Akuntansi
Sirtu	:	Pasir dan batu
SIS	:	Sistem Informasi Statistik
SITU	:	Surat Izin Tempat Usaha
SK	:	Surat Keputusan
SKF	:	Sub Koordinator Fungsi
SKTJM	:	Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak
SLA	:	<i>Service Level Agreement</i>
SOP	:	<i>Standard Operating Procedure</i>
SOTK	:	Struktur Organisasi dan Tata Kerja
SPJ	:	Surat Pertanggungjawaban
SPM	:	Surat Perintah Membayar
SPMMJ	:	Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan
SPMT	:	Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas
SPP	:	Surat Permintaan Pembayaran
SPT	:	Surat Pemberitahuan
SSKK	:	Syarat-Syarat Khusus Kontrak
STIS	:	Sekolah Tinggi Ilmu Statistik

T	
TA	: Tahun Anggaran
TAYL	: Tahun Anggaran Yang Lalu
TGR	: Tuntutan Ganti Rugi
TI	: Teknologi Informasi
TMT	: Terhitung Mulai Tanggal
TNI	: Tentara Negara Indonesia
TPKN	: Tim Penyelesaian Kerugian Negara
U	
UAKPA	: Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
UAKPB	: Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang
UAPKPB	: Unit Akuntansi Pembantu Kuasa Pengguna Barang
UPS	: <i>Uninterruptible Power Supply</i>
UU	: Undang-Undang
V	
<i>Vicon</i>	: <i>Video Conference</i>
<i>VPN</i>	: <i>Virtual Private Network</i>
<i>VSAT</i>	: <i>Very Small Aperture Terminal</i>
W	
Webinar	: <i>Website Seminar</i>
<i>Website</i>	: Situs web



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2022 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 13.a/LHP/XV/05/2023 tanggal 17 Mei 2023.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan BPS Tahun 2022 dengan pokok-pokok temuan diantaranya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan dan pemanfaatan Kegiatan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Tahun 2022 belum memiliki payung hukum, mengakibatkan hasil pelaksanaan Kegiatan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi berpotensi tidak dapat digunakan mengingat regulasi pelaksanaan dan pemanfaatan data belum ditetapkan;
2. Kekurangan penerimaan dari pencairan jaminan pelaksanaan yang belum diserahkan penyedia sebesar Rp687,74 juta, denda keterlambatan atas pembangunan gedung kantor BPS Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 sebesar Rp169,90 juta, dan hasil pelaksanaan Pembangunan Gedung Kantor BPS Provinsi Kalimantan Utara tidak dapat dimanfaatkan sehingga berisiko mangkrak;
3. Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp448,40 juta dan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi sebesar Rp163,40 juta atas Pekerjaan Konstruksi Renovasi Gedung 3 Sekretariat Utama BPS; dan
4. Hasil Sensus BMN Tahun 2021 pada Sekretariat Utama BPS belum sepenuhnya selesai ditindaklanjuti.

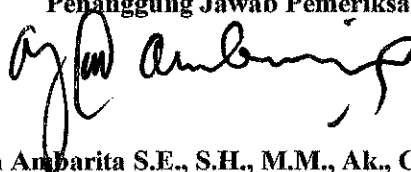
Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala BPS antara lain agar:

1. Berkoordinasi dengan Kementerian maupun pihak-pihak terkait dalam rangka perumusan dan penetapan mekanisme dan tata kelola pemutakhiran, interoperabilitas data, maupun pemanfaatan data Regsosek;
2. Menginstruksikan Sekretaris Utama untuk:
 - a. Memerintahkan PPK BPS Provinsi Kalimantan Utara:
 - 1) Menyetorkan pencairan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp687,74 juta ke Kas Negara; dan
 - 2) Menyetorkan kekurangan Denda Keterlambatan sebesar Rp169,90 juta ke Kas Negara;
 - b. Memerintahkan PPK 53 Biro Umum Sekretariat Utama untuk:
 - 1) Menyetorkan kelebihan pembayaran Pekerjaan Konstruksi Renovasi Gedung 3 Sekretariat Utama BPS sebesar Rp448,40 juta ke Kas Negara; dan
 - 2) Mengganti atau memperbaiki pekerjaan sesuai spesifikasi atau apabila tidak dilaksanakan penggantian harus mengembalikan pembayaran sebesar Rp163,40 juta ke Kas Negara.
 - c. Menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Sensus BMN pada Sekretariat Utama BPS Tahun 2021.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Jakarta, 17 Mei 2023

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Dr. Nelson Ambarita S.E., S.H., M.M., Ak., CFE., CA., CFSA.
Register Negara Akuntan Nomor 9630